BAB II

KERANGKA TEORITIK

A. KESWADAYAAN MASYARAKAT

1. Pengertian Swadaya

Jika dilihat dari arti yang sangat sederhana swadaya adalah kekuatan atau tenaga sendiri. Swadaya disini sangat menentukan cepat atau lambatnya pertumbuhan maupun perkembangan yang ada di suatu desa. Suatu contoh adalah di sebuah desa yang sangat terpencil namun desa itu mandiri. Semua pembangunan bermula dari partisipasi masyarakat, jadi cepat atau lambatnya perkembangan yang ada di desa tersebut bukan tergantung dari pemerintah tetapi masyarakat itu sendiri, kekuatan (keswadayaan) masyarakat membangun atau mengembangkan desa tersebut.

M. Nadhir berpendapat bahwa swadaya adalah sekumpulan orang secara suka rela yang bekerja sama dalam proses pemberdayaan sosial ekonomi kerakyatan, atas dasar prinsip dari, oleh, dan untuk, keadilan dan kesejahteraan anggota.[7] Di sini dapat di lihat bahwa swadaya dalam pengertinya tidak lepas dari pemaknaan pemberdayaan. Kata swadaya merupakan kata yang sama dengan pemberdayaan.

---

[7] M. Nadhir, *Memberdayakan Orang Miskin Melalui Kelompok Swadaya Masyarakat*, (Lamongnan Jawa Timur: YAPSEM, 2009), hal 34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara konsep, pemberdayaan berasal dari kata power (kekuasaan atau keberdayaan). Oleh sebab itu pemberdayaan bersentuhan dengan kemampuan untuk membuat orang lain melakukan apa yang di inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka dalam hal tertentu.[8]

Pheni Chalid berpendapat bahwa pemberdayaan adalah sebagai upaya untuk mentransformasikan segenap potensi pertumbuhan masyarakat menjadi suatu kekuatan nyata, untuk melindungi dan memperjuangkan nilai-nilai dan kepentingan di dalam arena segenap aspek kehidupan. Sebagai basis dari kehidupan masyarakat maka penguatan ekonomi rakyat, di samping pematangan budaya dan pemantapan agama, merupakan langkah yang sangat mendasar dalam rangka memberdayakan masyarakat. Pengembangan ekonomi dan nilai itu berguna bagi kemandirian serta pemerkuatan posisi tawar menawar (*bergaining position*) masyarakat untuk berhadapan dengan kekuatan negara.[9]

Ambar Teguh berpendapat bahwa pemberdayaan secara etimologis berasal dari kata "daya" yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai proses menuju berdaya, atau proses untuk pemberian daya atau kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.[10]

Dari kedua pendapat yang di kemukakan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya pemberdayaan tidaklah jauh pengertianya dari kemampuan. Menyalurkan atau mentransformasi potensi menjadi langkah awal untuk memberdayakan masyarakat. Tanpa adanya penyaluran potensi yang ada dapat dipastikan masyarakat tidak akan

---

[8] Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakna Masyarakat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial.*(Bandung; Refika Aditama, 2005), hal 57

[9] Pheni Chalid, *Teori dan Isu Pembangunan,* (Jakarta:Univeersitas Terbuka, 2007), hal 5.1

[10] Ambar teguh sulistiani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan,* (Yogyakarta:Gava Media, 2004), hal 77

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengalami kemajuan. Penyaluran potensi akan lebih cepat jika di barengi dengan adanya pengawasan, karena tanpa adanya pengawasan perjalanan pemberdayaan tidak dapat berjalan secara cepat.

Abu Huraerah berpendapat bahwa pemberdayaan berasal dari bahasa Inggris "*Empowerment*" secara harfiyah bisa diartikan sebagai "pemberkuasaan", dalam arti pemberian atau peningkatan "kekuasaan" (*power*) kepada masyarakat yang lemah atau tidak beruntung. Menurut Soetarso yang dikutip oleh Abu Huraerah pada hakikatnya pemberdayaan masyarakat mempunyai dua pengertian yang saling berkaitan yaitu:[11]

a. Peningkatan kemampuan, motivasi dan peran semua unsur masyarakat agar dapat menjadi sumber yang langgeng untuk mendukung semua jenis usaha kesejahteraan sosial.
   1) Semua warga masyarakat yang selama ini telah aktif mengabdikan diri dibidang usaha kesejahteraan sosial, baik secara perseorangan maupun dalam kelompok atau organisasi.
   2) Semua warga masyarakat, baik perseorangan maupun dalam kelompok seperti diatas karena alasan tertentu, tidak atau belum aktif mengabdikan diri dibidang usaha kesejahteraan sosial.
b. Pemanfaatan sumber masyarakat yang telah ditingkatkan kemampuan motivasi dan perannya.
   1) Pemahaman lingkungan
   2) Pemberian informasi
   3) Dramatisasi masalah
   4) Penggalangan dukungan
   5) Pengembangan momentum
   6) Penyediaan tempat atau lahan pengabdian
   7) Pelatihan dan pengembangan

Pengertian proses menunjuk pada serangkaian tindakan-tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan secara kronologis

[11] Abu Huraerah, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat Model dan Srategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*, (Bandung: Humaniora, 2008), hal 82-85

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sistematis yang mencerminkan pentahapan upaya merubah masyarakat yang kurang atau belum berdaya menuju masyarakat yang berdaya. Makna memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan menunjuk pada sumber inisiatif dalam rangka mendapatkan atau meningkatkan daya, kekuatan atau kemampuan sehingga memiliki keberdayaan. Kata memperoleh mengindikasikan bahwa yang menjadi sumber inisiatif untuk berdaya berasal dari masyarakat itu sendiri. Dengan demikian masyarakat yang mencari, mengusahakan, melakukan, menciptakan sesuatu atau meminta kepada pihak lain untuk memberi daya, kekuatan atau kemampuan. Sedangkan makna pemberian menunjuk pada sumber inisiatif bukan dari masyarakat. Inisiatif itu mengalihkan daya, kemampuan atau kekuatan adalah pihak-pihak yang memiliki kekuatan atau kemampuan seperti lembaga pemerintah atau agen perubahan.[12]

Keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Keberdayaan masyarakat adalah unsur-unsur yang memungkinkan masyarakat untuk bertahan dan dalam pengertian dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Keberdayaan masyarakat menjadi sumber dari apa yang ada dalam wawasan politik pada tingkat nasional disebut ketahanan nasional.[13]

2. Proses Penswadayaan Masyarakat

Kalau dilihat dari pengertian swadaya adalah sekumpulan orang secara suka rela yang bekerja sama dalam pemberdayaan sosial ekonomi kerakyatan, maka banyak tujuan dan manfaat dari swadaya.

---

[12] Ibid, hal 77-78

[13] Randy R Wrihatnolo, *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat,* (Jakarta: PT Elex Komputindo,2007), hal 75

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika dilihat dari pemaknaan yang sederhana proses swadaya sendiri ada yang tercipta dari dalam atau dimulai dari dalam komunitas sendiri. Ada pula yang dimulai dari luar atau mendapat dorongan dari luar, agar mampu berdaya mempunyai daya kekuatan.

Pada dasarnya kekuatan kelompok swadaya masyarakat sangat diperlukan, karena tak lain membantu proses pengembangan masyarakat. Banyak warga masyarakat yang hidup serba kekurangan belum mampu berdaya. Tidak mudah bagi mereka untuk mengembangkan kehidupan ekonomi keluarga. Keterbatasan pengetahuan, kelangkaan sumber daya, sempitnya peluang, membelenggu mereka tetap dalam kemiskinan. Saling menolong dan bekerja sama memperkuat pemupukan sumber pelayanan ekonomi dan memperluas kesempatan untuk kemajuan. Pendekatan kelompok sangat diperlukan karena mempunyai beberapa alasan sebagai berkut:[14]

a. Memperoleh persahabatan dan kerjasama
b. Mewujudkan semangat saling membantu
c. Melatih diri berfikir bersama dan bermusyawarah
d. Mengembangkan sikap dan motivasi untuk maju
e. Belajar memimpin dan bertanggung Jawab
f. Belajar merumuskan tujuan dan rencana hidup yang jelas
g. Mengembangkan sikap dan kebiasaan menabung
h. Mengembangkan kegiatan usaha produktif

Kelompok masyarakat sebaiknya memiliki kompetensi sebagai berikut:[15]

a. Mampu mengidentifikasi masalah dan kebutuhan komunitas.

[14] Ibid, hal 35
[15] Ibid, hal 82

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Mampu mencapai kesempatan tentang sasaran yang hendak dicapai dan skala prioritas.
c. Mampu menentukan dan menyepakati cara dan alat mencapai sasaran yang telah disetujui.
d. Mampu bekerja sama rasional dalam bertindak mencapai tujuan.

Pada hakikatnya pemberdayaan merupakan penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Logika ini di dasarkan pada asumsi bahwa tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa memiliki daya. Pada dasarnya setiap masyarakat pastilah memiliki daya tergantung bagaimana dia mengembangkan daya tersebut sesuai kemampuanya. Oleh sebab itu daya tersebut perlu digali, dan kemudian dikembangkan, jika asumsi ini yang berkembang, maka pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya dengan cara mendorong dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta upaya untuk mengembangkanya. Akar pemahaman yang dapat diambil dari kata-kata di atas adalah:[16]

a. Daya dipahami sebagai suatu kemampuan yang seharusnya dimiliki masyarakat, supaya mereka dapat melakukan sesuatu (pembangunan) secara mandiri.
b. Sedangkan pemberdayaan merupakan proses bertahap yang harus dilakukan dalam rangka memperoleh serta meningkatkan daya sehingga masyarakat mampu mandiri.

Pada dasarnya isi pemberdayaan dan keswadayaan berjalan dari dua arah yang berbeda. Maksudnya adalah dalam proses perjalananya

[16] *Ibid*, hal 79

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sendiri ada yang berangkat atau berasal dari dalam sendiri namun juga ada yang berasal dari luar. Adapun proses yang berasal dari dalam adalah proses yang dibangun di dalam komunitas atau yang berasal dari individu kelompok atau komunitas tanpa mengharapkan ide atau bantuan dari luar. Hal semacam ini biasanya berangkat dari insitaif kesadaran masyarakat akan pentingnya pembangunan sebagai langkah awal untuk menyongsong masa depan menjadi yang lebih baik. Mereka beranggapan bahwa perjalanan perkembangan yang terjadi tidak sesuai dengan yang diharapkan atau sungguh mengecewakan sehingga muncullah kesadaran untuk membangun. Tujuan utama dari swadaya dari dalam adalah untuk membangun kemandirian yang nyata agar masyarakat mampu berdiri sendiri dan memutuskan mata rantai ketergatungan terhadap pihak yang sudah mampu atau berdaya. Adapun yang berasal dari luar biasanya berasal dari pihak suasta atau pemerintah melalui program-program yang telah terencana dengan tujuan bersama untuk mensejahterakan masyarakat.

Pemberdayaan merupakan langkah yang sangat baik dalam proses pemecahan masalah terutama masalah kemiskinan. Lalu sampai kapankah pemberdayaan itu dilakukan? Pemberdayaan sendiri tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu mandiri, dan kemudian dilepas untuk mandiri, meski dari jauh dijaga agar tidak jatuh lagi. Dilihat dari pengertian tersebut pemberdayaan adalah suatu proses belajar hingga mencapai status mandiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana disampaikan dimuka bahwa proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap. Tahap-tahap yang harus dilalui tersebut adalah melalui:[17]

a. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.
b. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan kemampuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dam memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran didalam pembangunan.
c. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan kepada kemandirian.

Tahap pertama adalah tahap penyadaran dan pembentukan perilaku merupakan tahap persiapan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Pada tahap ini pihak pemberdayaan berusaha menciptakan prakondisi, supaya dapat memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan yang efektif. Apa yang di intervensi dalam masyarakat sesungguhnya lebih pada kemampuan afektifnya untuk mencapai kesadaran konatif yang di harapkan.[18]

Sentuhan akan terasa ini akan membawa kesadaran masyarakat bertumbuh, kemudian merangsang semangat kebangkitan mereka untuk meningkatkan kemampuan diri dan lingkungan.

Pada tahap kedua yaitu proses transformasi pengetahuan dan kecakapan keterampilan dapat berlangsung baik, penuh semangat dan berjalan efektif, jika tahap pertama teiah terkondisi. Masyarakat akan

---

[17] Ibid, hal 83
[18] Ibid, hal 83

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjalani proses belajar tentang pengetahuan dan kecakapan keterampilan yang memiliki relevansi dengan apa yang menjadi tuntutan kebutuhan tersebut. Pada tahapan ini masyarakat hanya dapat peran pertisipasi pada tingkat yang rendah.[19]

Pada tahap ketiga adalah merupakan tahap pengayaan atau peningkatan intelektualitas dan kecakapan keterampilan yang di perlukan, supaya mereka dapat membentuk kemampuan kemandirian. Kemandirian tersebut akan di tandai oleh kemampuan masyarakat dalam membentuk inisiatif, melahirkan kreasi-kreasi, dan melakukan inovasi-inovasi dalam lingkungan dalam kensep pembangunan masyarakat dalam kondisi seperti ini sering kali didudukkan sebagai subjek pembangunan atau pemerataan utama.[20]

Tujuan dasar pemberdayaan adalah keadilan sosial dengan memberikan ketentraman kepada masyarakat yang lebih besar serta persamaan politik dan sosial melalui upaya saling membantu dan belajar melalui pengembangan langkah-langkah kecil guna tercapainya tujuan yang lebih besar. Namun demikian, untuk memberdayakan masyarakat memerlukan rangkaian yang cukup pajang agar mereka menjadi lebih berdaya.

Proses pemberdayaan masyarakat secara implisit mengandung makna, terdapatnya faktor inisiatif yang berasal dan berkembang dari masyarakat sendiri, sedangkan peranan pemerintah bertindak sebagai

---

[19] Ibid, hal 83
[20] Ibid, hal 84

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penampung dan mempertimbangkan keluhan masyarakat. Dalam hal ini aparatur pemerintah sangat dituntut agar memiliki kepekaan serta kemampuan untuk dapat memberi respon, terhadap inisiatif dan keluhan yang berasal dari tingkat bawah dari pada menonjolkan kepentingan mereka sendiri atau berdalih pada menjaga kewibawaan pemerintah. Dalam kenyataan, inisiatif dan keluhan masyarakat bawah seringkali diabaikan, dan untuk memperoleh perhatian dan tanggapan mereka terpaksa mengambil jalan pintas walaupun kadang-kadang merupakan pelanggaran hukum, yaitu dengan melakukan pengrusakan ataupun pembakaran.

Proses pemberdayaan cenderung dikaitkan sebagai unsur pendorong sosial ekonomi dan politik. Pemberdayaan adalah suatu upaya dan proses bagaimana agar berfungsi sebagai power dalam pencapaian tujuanya yaitu pengembangan diri. Secara konseptual, pemberdayaan harus mencakup enam hal yaitu:[21]

a. *Learning by doing.* Artinya, pemberdayaan adalah suatu proses hal belajar dan ada suatu tindakan-tindakan konkrit yang terus menerus, yang dampaknya dapat terlihat.
b. *Problem solving.* Pemberdayaan harus memberikan arti terjadinya pemecahan masalah yang dirasakkan krusial dengan cara dan waktu yang tepat.
c. *Self evaluation.* Yaitu bahwa pemberdayaan harus mampu mendorong seseorang atau kelompok tersebut untuk melakukan evaluasi secara mandiri.
d. *Self development and coordination.* Artinya mendorong agar mampu melakukan pengembangan diri dan melakukan hubungan koordinasi dengan pihak lain secara lebih luas.

---

[21] Abu Huraerah, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat Model dan Srategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*, hal 86

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. *Self sellection.* Suatu kumpulan yang tumbuh sebagai upaya pemilihan dan penilaian secara mandiri dalam menetapkan langkah-langka kedepan.

Self decisim. Dalam memilih tindakan yang tepat hendaknya dimiliki kepercayaan diri dalam memutuskan sesuatu secara mandiri.

3. Peran Kelompok Swadaya Mempercepat Proses Pembangunan

Kemampuan individu, kelompok maupun komunitas dalam proses perubahan sangat mendukung dalam proses pembangunan. Proses perubahan yang dilakukan masyarakat semakin tahun semakin berkembang bukan hanya disatu bidang melainkan bisa di berbagai bidang baik dari segi sosial, budaya maupun politik. Agenda yang dibangun dan direncanakan dalam proses perubahan bisa berjalan lebih cepat ataupun bisa berjalan lebih lambat dari yang direncanakan. Hal semacam ini bisa dipengaruhi proses swadaya masyarakat di daerah setempat.

Peran swadaya masyarakat yang dilakukan terkadang bukan hanya membawa dampak bagi daerah itu sendiri melainkan bisa membawa dampak untuk daerah sekitarnya. Proses dan peran yang dilakukan asalkan membawa dampak positif akan lebih mudah berpengaruh terhadap lingkungan. Peran media masa disini sangat berpengaruh dalam proses persebarannya.

Perubahan yang terdapat disuatu daerah akan lebih cepat jika masyarakat yang tinggal dilingkungan tersebut mempunyai peran aktif bersama bila proses swadaya yang terjadi sangat kuat. Cepat atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lambatnya kemajuan suatu daerah sangat dipengaruhi peran partisipasi masyarakat dalam segala bidang termasuk peningkatan kesejahteraan, walupun disini peran lembaga juga sanggat besar. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan sehinga membutuhkan laju pertumbuhan yang sangat tinggi untuk mencapai kemajuan. Sudah sejak lama Indonesia dinamakan negara berkembang, dari paradigma yang seperti itu peran swadaya masyarakat sangat diperlukan untuk mempercepat laju pertumbuhan untuk mencapai kemajuan yang diharapkan.

Pemberdayaan disini mempunyai dua pengertian kunci yakni kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan disini bukan hanya kekuasaan politik dalam arti sempit, melainkan kekuasaan atau penguasaan klien atas:[22]

a. Pilihan personal dan kesempatan hidup, kemampuan dalam membuat keputusan mengenai gaya hidup, tempat tinggal dan gaya hidup.
b. Pendefisian kebutuhan, kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginan.
c. Ide atau gagasan, kemampuan mengespresikan dan menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan.
d. Lembaga-lembaga, kemampuan menjangkau, menggunakan dan mempengaruhi pranata masyarakat seperti lembaga pendidikan, kesejahteraan sosial dan kesehatan.
e. Sumber-sumber, kemampuan memobilisasi sumber formal, informal dan kemasyarakatan.
f. Aktivitas ekonomi, kemampuan memanfaatkan mekanisme produksi, distribusi barang dan jasa.
g. Reproduksi, kemampuan dalam kaitanya dengan kelahiran, perawatan anak, pendidikan dan sosialisasi.

[22] Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakna Masyarakat:Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial*, hal 59

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembangunan adalah instrumen untuk merubah suatu kondisi kemasyarakaan yang tidak sesuai dengan tuntutan keadan. Keswadayaan sebagai orientasi pembangunan nasional tidak berarti kita anti hubungan dengan luar negeri. Landasan keswadayaan adalah sarat agar kita tidak terjebak dalam kondisi hubungan yang asimetris. Keadaan yang asimetris ini memaksa negara miskin dan terbelakang untuk mengikuti cara yang tidak adil, yang merupakan penerusan dari hubungan ekonomi kolonialistis dalam bentuk baru. Membangun keswadayaan adalah orintasi pembangunan yang sah dan seharusnya menjadi ukuran keberhasilan pembangunan. Pembangunan dalam pandangan ini, bukanlah sekedar membangun ekonomi yang biasanya diukur dengan angka pertumbuhan. Pembanguan keswadayaan sebagai prooses budaya adalah rangkaian tindakan dan refleksi yang berdimensi sosial.[23]

Mungkin benar apabila dikatakan bahwa istilah "pembangunan nasional" oleh berbagai kelompok di masyarakat dengan persepsi dan konotasi yang berbeda-beda. Sementara warga masyarakat mungkin menggunakan istilah tersebut hanya dalam kontek ekonomi semata-mata . Warga masyarakat yang mempunyai persepsi demikian pada umumnya adalah mereka yang biasanya digolongkan kepada kaum yang kondisi ekonominya tidak atau belum menggembirakan. Mungkin ada pula sekelompok orang di masyarakat yang persepsinya

[23] Soetjipto Wirosardjono, *Pengembangan Swadaya Nasional,* (Jakarta: LP3ES, 1992), hal 32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang pembangunan sangat diwarnai oleh konteks konotasi politik, umpamanya konotasi yang dimiliki oleh para politisi. Tidak mustahil persepsi lain pun terdapat di masyarakat yang menyoroti pembangunan itu hanya dari segi tertentu dari kehidupan dan penghidupan bermasyarakat dan bernegara pada tingkat individual maupun pada tingkat kemasyarakatan.[24]

Dengan perkataan lain, bisa saja terdapat persepsi yang dapat dikatakan sempit di kalangan berbagai kelompok di masyarakat, dan hal ini tergentung dari apa yang dipandangnya.

Dalam konteks yang luas, pembangunan didasarkan pada lima ide pokok, yaitu :[25]

a. Pembangunan pada dirinya mengandung pengertian perubahan dalam arti mewujudkan suatu kondisi kehidupan yang lebih baik dari kondisi yang ada secara menyeluruh.
b. Ide pokok yang kedua yang inheren dalam pengertian pembanguan ialah pertumbuhan dalam arti kemampuan suatu bangsa untuk terus berkembang baik secara kulalitatif maupun kuantitatif.
c. Pembangunan adalah rangkaian usaha yang secara sadar dilakukan, artinya keadaan yang lebih baik, yang didambakan oleh suatu masyarakat, serta pertumbuhan yang diharapakan akan terus

---

[24] Alit Sarino *sambasalim.com/.../implikasi-paradigma-modernisasi-dan-dependensi-dalam-pembangunan-indonesia.html Diakses 19 mei 2011*
[25] *Ibid, Diakses 19 mei 2011*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berlangsung tidak akan terjadi dengan sendirinya apalagi secara kebetulan.

4. Sasaran Pemberdayaan

Sesungguhnya kalau kita fikirkan bersama siapakah sebenarnya yang menjadi sasaran pemberdayaan itu?. Tentunya kita sudah mampu mereka-reka siapakah sasaran tersebut yaitu masyarakat miskin karena mereka yang lebih membutuhkan proses pemberdayaan sesuai daya yang mereka miliki. Pemberdayaan sebagai bagian suatu bagian dari masyarakat miskin dengan tidak harus menghilangkan ketimpangan struktural lebih dahulu. Masyarakat miskin sebenarnya juga memiliki daya untuk membangun, dengan demikian memberikan "kail jauh lebih tepat dari pada meberikan ikan". Pemaknaan pemberdayaan selanjunya seiring dengan konsep *good governance.* Konsep ini mengetengahkan tiga pilar yang harus dipertemukan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Ketiga pilar tersebut adalah pemerintah, swasta dan masyarakat yang hendaknya menjalin kemitraan yang selaras.

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu atau masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Kemandirian masyarakat adalah merupakan kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dipandang tepat untuk melakukan pemecahan masalah yang dihadapi dengan menggunakan daya kemampuan.[26]

Pemberdayaan masyakarat hendaknya mengarah kepada pembentukan masyarakat yang lebih baik. Pada dasarnya pemberdayaan masyarakat didasari pada empat aspek kognitif, konatif, afektif dan psikomotorik. Kondisi kognitif pada dasarnya kemampuan berfikir yang dilandasi pengetahuan dan wawasan seseorang dalam rangka mencari solusi permasalahan. Kondisi konatif merupakan sikap perilaku masyarakat yang terbentuk yang diarahkan pada perilaku sensitif terhadap nilai pembangunan dan pemberdayaan. Kondisi afektif merupakan sense yang dimiliki masyarakat yang diharapkan dapat diintervensi untuk mencapai keberdayaan dalam sikap dan berperilaku. Sedangkan kemampuan psikomotorik kecakapan keteramppilan yang dimiliki masyarakat sebagai upaya pendukung masyarakat dalam rangka melakukan aktifitas pembangunan. Untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses. Melalui proses belajar maka secara bertahap masyarakat akan memperoleh kemampuan tersebut masyarakat harus menjalani proses belajar tersebut.

Pada awalnya upaya memberdayakan masyarakat pasti dihadapkan kondisi masyarakat atau bagian dari masyarakat yang masih dalam posisi dan kondisi yang lemah. Mungkin terjadi

---

[26] Ambar teguh sulistiani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, hal 80

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat secara keseluruhan yang berada pada wilayah tertentu sama sekali belum berdaya. Dengan demikian orientasi pemberdayaan memang secara tegas menunjuk pada suatu *targget group* masyarakat itu sendiri. Di sisi lain sangat mungkin terjadi bahwa sasaran yang perlu diberdayakan hanyalah merupakan bagian dari suatu masyarakat saja, yaitu khusus pihak yang belum memiliki daya.

B. PROGRAM TRANSMIGRASI DAN PENGEMBANGAN WILAYAH

1. Pengertian dan Sejarah Transmigrasi

Transmigran adalah pelaku atau orang yang melakukan program transmigrasi. Sedangkan transmigrasi sendiri memiliki arti pemindahan dan atau kepindahan penduduk dari suatu daerah untuk menetap kedaerah lain, yang ditetapkan di wilayah Republik Indonesia, guna kepentingan pembangunan Negara atau atas alasan-alasan yang dipandang perlu oleh pemerintah atau kepindahan yang berjalan secara alami.[27] Selain itu ada beberapa pendapat menjelaskan pengertian transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu wilayah yang padat penduduknya ke area wilayah pulau lain yang penduduknya masih sedikit atau belum ada penduduknya sama sekali. Transmigrasi di Indonesia biasanya diatur dan didanai oleh pemerintah kepada warga yang umumnya golongan menengah ke bawah. Sesampainya di tempat transmigrasi para transmigran akan diberikan

[27], Friedrich Ebert Stiftung, *Pemantapan Usaha Pembangunan di Daerah Transmigrasi*, (Jakarta: Pusat Pembinaan Sumber Daya Manusia, 1980) hal 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebidang tanah, rumah sederhana dan perangkat lain untuk penunjang hidup di lokasi tempat tinggal yang baru. Dalam proses pelaksanaanya transmigrasi mempunyai banyak tujuan meratakan persebaran penduduk, mengurangi jumlah pengangguran. Namun, dalam proses penelitian disini transmigrasi adalah sebagai upaya pengentasan kemiskinan dengan tujuan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sudah banyak terbukti bahwa dengan adanya program transmigrasi, jumlah pendapatan masyarakat akan meningkat. Adapun pengaruhnya bagi kehidupan akan menurunkan angka kemiskinan yang semakin hari semakin bertambah.

Untuk mengatasi kepadatan penduduk, pemerintah menggalakkan program transmigrasi. Adapun jenis-jenis transmigrasi yang ada adalah:[28]

a. Transmigrasi umum, yaitu transmigrasi yang biayanya ditanggung pemerintah ditujukan untuk penduduk yang memenuhi syarat.
b. Transmigrasi spontan/swakarsa, yaitu transmigrasi yang seluruh pembiayaannya ditanggung sendiri. Pemerintah hanya menyediakan lahan pertanian dan rumah.
c. Transmigrasi lokal, yaitu transmigrasi yang dilakukan dalam satu wilayah provinsi.
d. Transmigrasi khusus/sektoral, yaitu transmigrasi yang dilakukan karena penduduk terkena bencana alam.
e. Transmigrasi bedol desa, yaitu transmigrasi yang dilakukan oleh seluruh penduduk desa berikut pejabat-pejabat pemerintahan desa.

[28] Sir Alex Ferguson Http//Bataviase.co.id/node/441606 *Diakses 4 Mei 2011*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Masa Sebelum Kemerdekaan

Semenjak pertengahan abad 19 pemerintahan Hindia Belanda mulai membuka hati dan pikiranya untuk bersikap lebih manusiawi dengan memperhatikan kesejahteraan daerah jajahanya dengan politik etis (balas budi). Oleh karena itu pertengahan abad 19 suatu komisi Negara ditugaskan untuk meneliti kesejahteraan masyarakat di daerah pedesaan dipulau Jawa. Van Deventer membuat perumusan yang pokoknya adalah melaksanakan pembangunan sekolah, perbaikan produksi dan pemindahan penduduk dari Jawa ke daerah lain diluar Jawa. Berhubungan dengan itu pemerintahan Belanda menugaskan Heyting untuk mempelajari kemungkinan pemindahan masyarakat dari Jawa ke daerah diluar Jawa. Pada tahun 1903 mengusulkan suatu sistem yang intinya[29]: 1) Membangun desa inti dengan jumlah penduduk 500 KK setiap desa inti. 2) Penduduk desa inti diberi bantuan secukupnya agar ekonomi mereka lekas kuat dan selanjutnya desa tersebut bisa dijadikan basis koloni.

Pada tahun 1905 sampai tahun 1927 dibuatlah program Gedong Tataan yang letaknya di Tanjung Karang sebagi langkah awal pemindahan, yang selanjutnya dikenal dengan program transmigrasi. Antara tahun 1930-1935 dunia dilanda krisis ekonomi yang hebat memaksa para perusahaan yang berada diluar pulau Jawa mengembalikan pekerjanya ke daerah asal. Masyarakat desa yang sifatnya kerukunan maka mau dikembalikan ke desa. Namun, karena kondisi perekonomian semakin sulit maka terjadi ganguan keamanan. Karena terdesak oleh keadaan di Jawa maka pemerintahan kolonial memulai kembali usaha pemindahan penduduk yang sempat terhenti pada tahun 1927. Karena Gedong Tatan sudah penuh maka dicarikan tempat lain maka ditempatkan dihutan cadangan milik wagra yang berada di daerah Sukadana sehingga disebut transmigrasi Metro.[30]

b. Masa Orde Lama

Ketika baru merdeka dari penjajahan Jepang, di Indonesia masih terjadi gejolak politik, sehingga permasalahan kepadatan penduduk masih terabaikan. Baru tahun 1948 pemerintah Republik

[29] Sri Edi Swasono dan Masri Singarimbun, *Transmigrasi Di Indonesia,* (Jakarta: Universitas Inddoonesia, 1985), hal 9
[30] Ibid hal 8-9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia membentuk panitia untuk mempelajari program serta pelaksanaan transmigrasi yang diketuai oleh A. H. D. Tambunan. Walaupun telah terbentuk kepanitiaan, keputusan yang menyangkut masalah transmigrasi baru diambil pada tahun 1950. Bulan Desember 1950 merupakan awal mula pemberangkatan transmigran di jaman kemerdekaan ke Sumatera Selatan. Pelaksananya ditangani oleh Jawatan Transmigrasi yang berada di bawah Kementrian Sosial. Baru tahun 1960 Jawatan Transmigrasi menjadi Departemen yang digabung dengan urusan perkoperasian dengan nama Depertemen Transmigrasi dan Koperasi. Pada masa ini, selain tujuan demografis, tujuan lainnya tidak jelas. Namun Presiden Soekarno sendiri tidak fokus pada kelebihan penduduk Jawa, tetapi hanya melihat adanya ketimpangan kepadatan penduduk pulau Jawa dan luar Jawa.[31]

c. Masa Orde Baru

Pada masa orde baru, tujuan utama transmigrasi tidak semata-mata memindahkan penduduk dari pulau Jawa ke luar Jawa, namun ada penekanan pada tujuan memproduksi beras dalam kaitan pencapaian swasembada pangan. Pembukaan daerah transmigrasi diperluas ke wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi, bahkan sampai ke Papua. Tahun 1965-1969, belum ditentukan target jumlah transmigran yang harus

[31] *www.scribd.com Diakses 19 mei 2011*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipindahkan. Bahkan terkesan belum begitu perhatian terhadap progran transmigrasi. Daerah transmigran seperti Lampung, Jambi, Sumatera Selatan yang pada awalnya banyak sekali menerima transmigran, pada periode ini hanya menerima sekitar 52 persen dari total transmigran yang diberangkatkan. Jumlah yang dikirim ke Sulawesi sekitar 25 persen, sisanya ke pulau-pulau lain seperti Kalimantan dan Papua.[32]

Jika pada masa orde lama dikenal empat katagori transmigrasi, pada periode ini hanya dikenal dua kategori yaitu transmigrasi umum dan transmigrasi spontan. Pada transmigrasi spontan pemerintah hanya mengorganisir perjalanan dari daerah asal ke tempat tujuan, ongkos ongkos semua ditanggung peserta. Sementara transmigrasi spontan, semua ongkos ditanggung pemerintah, dan di lokasi memperoleh lahan seluas dua hektar, rumah, dan alat-alat pertanian, serta biaya selama 12 bulan ada fase terakhir yaitu fase posttransisi, dimana pendidikan yang didapatkan oleh setiap masyarakat sudah sangat tinggi, pengetahuan yang dimilikipun bertambah dengan pesat. Banyak penemuan-penemuan baru di segala bidang. Kualitas kesehatan dan bidang-bidang lainnya sangat meningkat. Peningkatan teknologi menyebabkan semua kebutuhan yang diperlukan tersedia dalam suau tempat. Orang-orang tidak perlu lagi bepergian ke tempat-tempat yang jauh untuk

[32] Ibid *Diakses 19 mei 2011*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memenuhi kebutuhannya. Hal ini menyebabkan mobilitas penduduk pada masa itu sangat rendah.[33]

2. **Pembangunan Transmigrasi**

Tujuan pembangunan transmigrasi di masa reformasi. *Pertama,* menggeser paradigma mekanistik ke paradigma holistic. Program transmigrasi tidak hanya mendistribusikan sumber daya manusia pasif dari satu pulau ke pulau lainya, tapi mendistribusikan sumber daya manusia yang produktif untuk menggali dan mengembangkan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi yang terdapat di daerah transmigrasi. *Kedua,* memperkuat ekonomi lokal. Program transmigrasi secara ideal harus dapat memperkuat potensi dan pengembangan sumber daya lokal. Sumber daya alam potensinya harus digali dan dikembangkan secara optimal dengan membuat program intensifikasi (peningkatan kegiatan yang lebih hebat) dan ekstensifikasi (perluasan lahan) di sektor pertanian dan perkebunan. *Ketiga,* mendukung pengembangan wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar. *Keempat,* mendukung kebijakan energy alternatif[34].

Dalam setiap gerakan komunitas maupun kelompok yang mempunyai tujuan yang jelas sudah memiliki peran yang baik bagi tujuanya. Peranan disini sangat dituntut untuk menunjang proses pengembangan apalagi mempunyai dampak yang cukup besar. Kalau berbicara masalah peran komunitas atau masyarakat muslim

---

[33] Ibid *Diakses 19 mei 2011*

[34] Http//Bto.depnakertrans.go.id/ss/atikel.ph.*Diakses* tanggal 4 Mei 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

transmigran dalam proses pembangunan tentu sudahlah pasti. Disini pembangunan mempunyai arti suatu konsep yang berdimensi luas dan senantiasa berkembang seiring dengan tuntutan masa dan kebutuhan masyarakat.[35] Sebenarnya bukan hanya komunitas muslim saja tapi semua masyarakat transmigran mempunyai peran dalam proses pembangunan. Dalam proses pembangunan bermacam-macam cara yang digunakan. Masyarakat muslim transmigran dalam proses pembangunan ini akan sangat terlihat jika dipandang dari segi ekonomi. Hal ini terbukti dibidang ekonomi mereka lebih unggul, karena dengan daerah pertanian yang cukup baik bisa meningkakan pendapatan dan bisa mengurangi angka kemiskinan yang ada. Ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam proses pembangunan yaitu:[36]

a. Pendekatan pertumbuhan ekonomi (*Economic growth approach*)
b. Pendekatan kebutuhan dasar (*Basic needs approach*)
c. Pendekatan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable development approach*)
d. Pendekatan pembangunan sosial (*Social development approach*)
e. Pendekatan pembangunan berpusat pada rakyat (*People centered development approach*)
f. Pendekatan kesejahteraan sosial (*Social welfare approach*).

Paradigma transmigrasi yang berciri demografis-sentris telah melahirkan berbagai kebijakan publik yang lebih menekankan pengerahan dan pemindahan penduduk secara besar-besaran. Penyelenggaraan transmigrasi didasarkan atas kebutuhan untuk

[35] Abu Huraerah, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat Model dan Srategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*, hal 12
[36] Ibid, hal 13-29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendorong perpindahan penduduk sebanyak-banyaknya dari dan keluar luar Jawa. Implikasi kebijakan lainnya adalah bahwa transmigrasi diselenggarakan dengan mengejar target sasaran pemindahan secara kuantitatif.

Hasil pencermatan terhadap dinamika perubahan pada masa lalu, dapat diperoleh suatu pemahaman, bahwa pembangunan transmigrasi harus didasarkan atas paradigma baru yang lebih relevan dengan tuntutan perubahan dan perkembangan masyarakat. Paradigma baru yang diperlukan di masa mendatang mencakup berbagai hal dalam spektrum sebagai berikut:[37]

a. Pengalaman pembangunan transmigrasi yang lebih mengutamakan pertimbangan demografis sentris, ternyata berimplikasi pada rendahnya solusi pemenuhan kepentingan masyarakat (pendatang dan lokal). Karena itu transmigrasi kedepan haruslah didasarkan atas paradigma pemenuhan kebutuhan masyarakat.
b. Pengalaman pembangunan transmigrasi yang lebih menekankan upaya pemindahan penduduk, dalam implementasinya telah terjebak pada pencapaian target kuantitatif pemindahan penduduk setiap tahun. Karena itu transmigrasi kedepan haruslah didasarkan atas kebutuhan pengarahan dan persebaran penduduk secara permanen ke daerah yang membutuhkan dan sesuai dengan peruntukkannya.
c. Pengalaman pembangunan transmigrasi yang lebih menekankan pemecahan masalah ketimpangan pembangunan antar daerah, dalam implementasinya terjebak pada pemerataan proyek transmigrasi di seluruh wilayah. Karena itu, transmigrasi ke depan haruslah didasarkan atas kebutuhan pembangunan daerah.
d. Pengalaman pembangunan transmigrasi yang lebih menekankan penyediaan fasilitas pemukiman, akhirnya terjebak pada rendahnya perkembangan ekonomi karena kurang adanya jaminan prospek dan kepastian usaha. Karena itu, transmigrasi kedepan harus didasarkan atas kebutuhan untuk menyediakan peluang berusaha

[37] *bto.depnakertrans.go.id/. 17 Mei 2011*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau kesempatan kerja dengan prospek dan jaminan kepastian usaha.

3. **Transmigrasi Sebagai Konsep Pengembangan Wilayah**

Secara harfiah, ilmu wilayah dapat dipandang sebagai ilmu yang mempelajari aspek-aspek dan kaidah-kaidah kewilayahan, dan mencari cara-cara efektif dalam mempertimbangkan aspek-aspek dan kaidah-kaidah tersebut kedalam proses perencanaan pengembangan kualitas hidup dan kehidupan manusia.

Secara filosofis suatu proses pembangunan dapat diartikan sebagai upaya yang sistematik dan berkesinambungan untuk menciptakan keadaan yang dapat menyedikan bermacam alternatif yang sah bagi pencapaian aspirasi setiap warga yang paling humanistik. Dengan perkataan lain proses pembangunan adalah proses memanusiakan manusia. Di berbagai negara berkembang, pembangunan lebih mengarah kepada bentuk fisik artinya melakukan kegiatan pembangunan yang bersifat fisik, sering kali dalam arti yang sempit diartikan sebagai pembangunan infrastruktur.

Todaro berpendapat yang dikutip oleh Ernan Rustiadi bahwa pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan yang mendasar atas struktur yang mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi nasional, disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan.[38]

Sebagian pakar ekonomi pembangunan berpendapat bahwa hakekat pembangunan secara sederhana adalah terjadinya

[38] Ernan Rustiadi, Sunsun Saefulhakim, Dyah R.. Panuju, *Perencanaann Dan Pengembangnan Wilayah*, (Jakarta: Yayasan Obor Iindoonesia, 2009), hal 120

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan pendekatan sejarah pertubuhan negara didunia. Menurut Rostow proses pertumbuhan dapat dibedakan menjadi lima tahapan dan setiap negara atau wilayah dapat digolongkan ke dalam salah satu dari lima tahapan tersebut. Adapun lima tahapan tahapan tersebut adalah:[39]

a. Masyarakat tradisional (*the traditional society*)

Sistem masyarakat tradisional merupakan kondisi pada tahap awal pertumbuhan dimana struktur perekonomian berkembang dalam fungsi produksi terbatas yang didasarkan pada teknologi, ilmu pengetahuan dan sikap masyarakat seperti masa sebelum Newton dengan ciri-ciri sebagai berikut: 1). Sistem produksi yang relatif primitif, tingkat produksi perkapita dan produtifitas pekerja sangat terbatas, sumber daya masyarakat diarahkan kepada sektor pertanian. 2). Kehidupan masyarakat masih didasarkan atas nilai-nilai dan pemikiran yang bukan rasional atau kebiasaan turun temurun. 3). Strukktur sosial yang bukan hierarkis yang kurang memungkinkan terjadinya mobilitas sosial vertikal, sehingga status anak sama dengan orang tuannya. 4). Pusat kekuatan politik ada pada tuan tanah di desa setempat, sehingga kebijakan selalu dipengaruhi tuan tanah.

[39] Ibid, hal 121-125

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Prasyarat lepas landas (*the precondition take-of*)

Tahapan kedua ini merpakan masa transisi mempersiapkan diri atau dipersiapkan dari luar untuk mencapai pertumbuhan yang mempunyai kekuatan untuk terus berkembang. Adapun ciri-cirinya sebagai berikut: 1). Terciptanya kerangka landasan struktur sosial, politik, dan perekonomian secara mantap menunjang lepas landas. 2). Sektor pertanian memegang peranan penting sehingga mencapai swasembada (*self sunstained*) dan mendorong terjadinya *backwardk* dan *forward multiplier*. 3). Pengembangan prasarana umum yang dilakukan pemerintah. 4). Terjadinya elit kepemimpian yang baru yang lebih *reactiv nationalism*, yakni bereaksi secara positif terhadap tekanan kritikan yang datang dari luar.

c. Lepas landas (*the take-of*)

Pada tahapan ini sudah terdapat perbedaan yang sangat signifikan dalam masyarakat, seperti refolusi politik, tercapainya inovasi baru peningkatan penanaman modal dan pertumbuhan pendapatan melebihi pertumbuhan penduduk. Adapun ciri-ciri masyarakat lepas landas adalah: 1). Pertumbuhan investasi produk lebih dari 10% dari produk nasional. 2). Terdapat satu atau beberapa industri dengan tingkat perkembangan yang tinggi. 3). Adanya kerangka dasar politik, sosial dan institusional yang mendorong perluasan sektor modern. 4). Bekembangnya golongan pengusaha.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Gerakan kearah kedewasaan (*the drive to maturity*)

Masa ini masyarakat sudah menggunakan teknologi modern pada sebagian besar faktor produksi dan sumber daya alam. Adapun ciri-ciri gerakan ini adalah: 1). Adanya transformasi sosial yang nyata. 2). Staf kepemimpinan dalam sebuah perusahaan ditentukan oleh manager profesional. 3). Masyarakat secara keseluruhan telah bosan terhadap keajaiban industrialisasi.

e. Masa konsumsi tinggi (*the age of high mass consumption*

Tahap ini perhatian masyarakat sudah pada kesejahteraan masyarakat. Masyarakat saling berkompetisi mendapat sumber daya dan sokongan untuk: 1). Memperbesar kekuasaan dan pengaruhnya keluar. 2). Menciptakan suatu *Welfare State* yang lebih merata kepada penduduknya. 3). Mempertinggi tingkat konsumsi masyarakat diatas konsumsi utama.

Kalau kita kaitkan antara transmiggrasi dengan pembangunan dan pengembangan wilayah selalu berjalan beriringan. Disini transmiggrasi mempunyai peranan penting didalam proses pengembangan wilayah. Transmigrasi bukan semata-mata untuk penyebaran penduduk kalau dilihat dengan mata telanjang. Namun, dalam perjalananya justru bisa meningkatkkan proses pembangunan dan pengembangan wilayah baik dari segi ekonomi, politik, sosial maupun dari segi budaya. pengembangan dan pembangunan bukan hanya berada di daerah yang ramai atau daerah perkotaan semata.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam perjalananya transmigrasi ternyata sebagai proses pengembangan dan pembangunan wilayah yang sangat baik. Selain dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pertanian juga bisa meratakan proses pembangunan yang tadinya daerah yang terpencil dan pelosok diubah menjadi daerah yang mampu berkembang dan maju.

Dalam proses perkembagannya transmigrasi mengalami kemajuan yang sangat pesat. Hal ini terbukti dulunya daerah yang dikatakan daerah minus tapi sekarang bisa maju dan berkembang dengan pesat. Hal ini terbukti dengan banyaknya kemajuan kemajuan yang dialami masyarat yang tadinya status sosialnya terdapat dibawah rata-rata kini sudah mampu.

4. Komunitas Muslim Transmigran

Kalau dilihat dari arti dasarnya komunitas adalah masyarakat seluruh populasi yang hidup bersamaan disuatu daerah.[40] Namun, ada juga ada yang mejelaskan bahwa komunitas itu sekelompok orang yang saling peduli satu sama lain lebih dari yang seharusnya, dimana di dalam sebuah komunitas terjadi relasi pribadi yang erat antara para anggota komunitas tersebut karena adanya kesamaan.

Jadi maksud dari komunitas muslim transmigran sendiri adalah sekelompok orang-orang muslim transmigran yang hidup bersama yang saling peduli antara yang satu dengan yang lainya. Disini tidak

[40] Soeharso dan Ana Retno Ningsih, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, hal 300

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada yang membedakan dari mana mereka berasal namun lebih mengutamakan kebersamaan karena adanya perasaan senasib seperjuangan. Hubungan kekerabatan komunitas muslim ini sangat baik mereka bisa selalu hidup berdampingan walaupun mereka baru kenal, hal ini tebukti belum lama mereka tinggal di daerah transmigrasi namun mereka sudah mampu hidup berdampingan dengan baik tanpa memandang suku dan dari mana daerah asalnya.

Pada dasarnya masyarakat transmigrasi yang berada di Sumatera khususnya daerah Jambi adalah beragama Islam. Hampir di setiap Desa mayoritas beragama Islam kurang lebih mencapai 95%. Hal ini terjadi karena mereka mayoritas berasal dari pulau Jawa yang merupakan basis agama Islam terbesar. Namun walaupun kebanyakan beragama Islam tidak menyurutkan pergaulanya dengan masyarakat yang beragama lain. Kerukunan antar umat beragama disini sangat terjaga, hal ini terjadi karena persamaan senasib dan seperjuangan sama-sama sebagai seorang pendatang atau masyarakat perantau. Masayarakat yang beragama non muslim disini kebanyakan berasal dari pulau Sumatera sendiri terutama yang berasal dari Sumatera Barat walaupun ada sebagian kecil masyarakat yang non muslim yang berasal dari pulau Jawa.

Bisa dikatakan komunitas muslim yang berada di daerah transmigrasi sangatlah besar. Namun, dalam proses pengorgansasianya tidak bisa seerat yang berada di pulau Jawa. Banyak sekali kegiatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keagamaan yang direncanakan tapi dalam pelaksanaanya kurang bisa maksimal. Kalau dilihat dari infrastruktur yang dimiliki komunitas muslim trasmigran sangatlah baik karena tingkat kesadaran akan pembangunan sangatlah tinggi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id